

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Surat Keputusan Gubernur Nomor 489/KPTS/2023 mengenai pemenuhan hak pekerja atas upah minimum provinsi (UMP) di Kota Ternate. Surat keputusan ini diterbitkan sebagai langkah untuk memastikan setiap pekerja di Kota Ternate menerima upah yang sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Metodologi penelitian ini melibatkan studi lapangan, wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk pekerja, pengusaha, dan pejabat pemerintah setempat, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi surat keputusan tersebut menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman di kalangan pengusaha mengenai ketentuan upah minimum, serta keterbatasan dalam pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas terkait. Selain itu, ditemukan juga adanya perbedaan pandangan antara pekerja dan pengusaha mengenai penyesuaian upah berdasarkan UMP yang baru.

Sebagian besar pekerja merasa keputusan ini membantu meningkatkan kesejahteraan mereka, namun di sisi lain, pengusaha mengkhawatirkan peningkatan biaya operasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun surat keputusan gubernur ini merupakan langkah positif menuju pemenuhan hak pekerja, dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan implementasi. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan sosialisasi mengenai ketentuan UMP, penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, serta dialog yang konstruktif antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Kata Kunci : Kata Kunci : Surat Keputusan Gubernur, Implementasi UMP, Kota Ternate